

MATRIK GENDER ANALYSS PATHWAY (GAP)

OPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

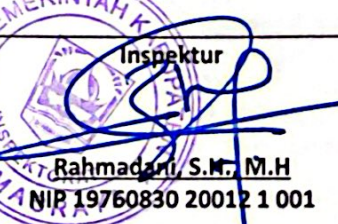
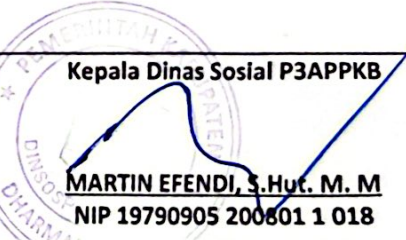
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tujuan : Mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang profesional dan responsif gender.	Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. No.8 Th 2025 Data tenaga pelayanan umum kantor berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan keterlibatan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah. Tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 136 orang dengan komposisi laki-laki 69 orang (50,74%) dan perempuan 67 orang (49,26%) Tenaga Administrasi Laki-laki = 42 orang Perempuan = 29 orang Tenaga kebersihan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 25 orang Tenaga keamanan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 0 orang	Akses: Belum optimalnya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses informasi, peluang kerja, dan pembagian tugas pada pelayanan umum kantor. Masih terdapat persepsi bahwa beberapa pekerjaan tertentu lebih sesuai untuk jenis kelamin tertentu. Partisipasi: Keterlibatan tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan umum kantor belum seimbang. Pembagian peran dalam pekerjaan masih dipengaruhi oleh kebiasaan dan persepsi kemampuan fisik. Kontrol: Belum optimalnya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam memberikan masukan terkait pembagian tugas dan pelaksanaan pekerjaan. Pengambilan keputusan terkait penempatan dan pembagian pekerjaan masih lebih banyak ditentukan berdasarkan pertimbangan kebiasaan.	- Belum tersedianya data tenaga pelayanan umum kantor yang terpilah berdasarkan gender secara optimal. - Pembagian tugas masih berdasarkan kebiasaan dan persepsi kemampuan fisik. - Kesempatan kerja belum sepenuhnya mempertimbangkan kesetaraan gender.	Persepsi masyarakat bahwa pekerjaan Pelayanan Umum Kantor lebih cocok dilakukan oleh perempuan atau laki-laki tertentu. - Faktor sosial dan kondisi lingkungan kerja mempengaruhi minat tenaga kerja.	Menyediakan tenaga Pelayanan Umum Kantor yang memberikan kesempatan kerja yang setara bagi laki-laki dan perempuan sesuai kompetensi serta kebutuhan pekerjaan	- Melakukan pendataan tenaga Pelayanan Umum Kantor berdasarkan jenis kelamin. - Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan dan penempatan tenaga Pelayanan Umum Kantor. - Menyediakan perlengkapan kerja yang aman dan sesuai kebutuhan tenaga laki-laki maupun perempuan. - Melakukan pembayaran Honorarium kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan) - Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan,	Data awal jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor berdasarkan gender Tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 145 orang dengan komposisi laki-laki 92 orang (63,45%) dan perempuan 53 orang (36,55%) Tenaga Administrasi Laki-laki = 45 orang Perempuan = 9 orang Tenaga kebersihan, Laki-laki = 7 orang Perempuan = 27 orang Tenaga keamanan, Laki-laki = 8 orang Perempuan = 0 orang Tenaga pengemudi Laki-laki = 29 orang Perempuan = 0 orang Juru Masak Laki-laki = 3 orang Perempuan = 17 orang	Input : Target Anggaran tahun 2027 Rp. 3.985.645.500,- - Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Outcome : - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang profesional dan responsif gender.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	Tenaga pengemudi Laki-laki =9 orang Perempuan =0 orang Juru Masak Laki-laki =6 orang Perempuan =13 orang	Manfaat : Manfaat dari kesempatan kerja dan pengembangan kemampuan belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Kesempatan memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, dan penghargaan kerja belum mempertimbangkan kesetaraan gender secara optimal.				Sopir, Juru Masak, dan Keamanan)		

Pulau Punjung, 24 Juni 2026

KEPALA BAGIAN UMUM

ZEFNI YUSUF, S.AP.,MM
 Pembina / IV.a
 NIP 19761229 200501 1 004

 Rahmadani, S.M., M.H NIP 19760830 20012 1 001	 Marten Yunus, S.Kom., M.Eng NIP 19740821 200212 1 001	 Firdaldi, S.T., M.Sc NIP 19751205 200501 1 004	 MARTIN EFENDI, S.Hut. M. M NIP 19790905 200601 1 018
---	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN : 2027
 ANGGARAN : Rp. 3.985.645.500,-

PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN						
KODE PROGRAM	4.01.01						
KEGIATAN	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
HASIL/OUTPUT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data tenaga pelayanan umum kantor berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan keterlibatan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah. <table> <tr> <td>Tenaga Administrasi Laki-laki = 42 orang Perempuan = 29 orang</td><td>Tenaga kebersihan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 25 orang</td></tr> <tr> <td>Tenaga keamanan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 0 orang</td><td>Tenaga pengemudi Laki-laki = 9 orang Perempuan = 0 orang</td></tr> <tr> <td>Juru Masak Laki-laki = 6 orang Perempuan = 13 orang</td><td></td></tr> </table> a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses: Belum optimalnya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses informasi, peluang kerja, dan pembagian tugas pada pelayanan umum kantor. Masih terdapat persepsi bahwa beberapa pekerjaan tertentu lebih sesuai untuk jenis kelamin tertentu. - Partisipasi: Keterlibatan tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan umum kantor belum seimbang. Pembagian peran dalam pekerjaan masih dipengaruhi oleh kebiasaan dan persepsi kemampuan fisik. - Kontrol: Belum optimalnya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam memberikan masukan terkait pembagian tugas dan pelaksanaan pekerjaan. Pengambilan keputusan terkait penempatan dan pembagian pekerjaan masih lebih banyak ditentukan berdasarkan pertimbangan kebiasaan. - Manfaat : Manfaat dari kesempatan kerja dan pengembangan kemampuan belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Kesempatan memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, dan penghargaan kerja belum mempertimbangkan kesetaraan gender secara optimal.	Tenaga Administrasi Laki-laki = 42 orang Perempuan = 29 orang	Tenaga kebersihan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 25 orang	Tenaga keamanan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 0 orang	Tenaga pengemudi Laki-laki = 9 orang Perempuan = 0 orang	Juru Masak Laki-laki = 6 orang Perempuan = 13 orang	
Tenaga Administrasi Laki-laki = 42 orang Perempuan = 29 orang	Tenaga kebersihan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 25 orang						
Tenaga keamanan, Laki-laki = 6 orang Perempuan = 0 orang	Tenaga pengemudi Laki-laki = 9 orang Perempuan = 0 orang						
Juru Masak Laki-laki = 6 orang Perempuan = 13 orang							

	b. Penyebab Internal - Belum tersedianya data tenaga pelayanan umum kantor yang terpilah berdasarkan gender secara optimal. c. Penyebab Eksternal - Persepsi masyarakat bahwa pekerjaan Pelayanan Umum Kantor lebih cocok dilakukan oleh perempuan atau laki-laki tertentu.
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. - Ketersedian tenaga Pelayanan Umum Kantor yang mendukung pelayanan kantor secara efektif dan memperhatikan kesetaraan gender. 2. Indikator dan Target Kinerja Input : Dana yang dibutuhkan Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/ 12 Laporan Outcome Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang profesional dan responsif gender.
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 3.985.645.500,- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
RENCANA AKSI	Kegiatan 1 : Melakukan pembayaran Honorarium kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan)
	Masukan : Rp. 3.985.645.500,-
	Keluaran : Honorarium tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan)yang dibayarkan
	Hasil : Terpenuhinya pembayaran Honorarium tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan secara tepat waktu serta tersedianya tenaga pelayanan umum kantor yang profesional, efektif dan responsif gender.
	Kegiatan 2 : Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan) Masukan : Rp. 0,- Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan monitoring kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan) Hasil : Meningkatnya disiplin kerja, profesionalitas, efektifitas tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional kantor.

Pulau Punjung, 24 Juni 2026

KEPALA BAGIAN UMUM,

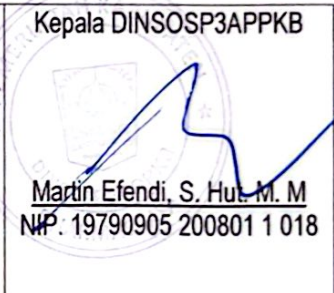


ZERNI YUSUF, S.AP. MM

Pembina / IV.a

NIP. 19761229 200501 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur Rahmadani, S.H., M.H NIP. 19760830 200012 1 001	 Kepala BKD Maden Yunus, S.Kom, M.Eng NIP. 19740821 200212 1 001	 Kepala Bapperida Erinaldi, S.T., M.Sc NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sasaran Program		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan pelayanan umum kantor yang efektif, efisien,
Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Latar Belakang	Dasar Hukum	• Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) No. Tahun 2026. • Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD No. Tahun 2026.
	Gambaran Umum	Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan dukungan pelayanan umum kantor yang memadai.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Melakukan pembayaran Honorarium kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan) 2. Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Administrasi, Kebersihan, Sopir, Juru Masak, dan Keamanan)
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibatasi pada penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan rencana kebutuhan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD
Maksud dan Tujuan		Maksud: Menyediakan kebutuhan pelayanan umum kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan: Menjamin tersedianya pelayanan operasional kantor secara berkelanjutan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		-Melakukan perencanaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. -Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Bagian Umum (Dharmasraya)

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2027
Biaya	Rp. 3.985.645.500,-

Pulau Punjung, 24 Juni 2026


KEPALA BAGIAN UMUM
ZEFNI YUSUF, S.AP.,MM
 Pembina / IV.a
 NIP. 19761229 200501 1 004